



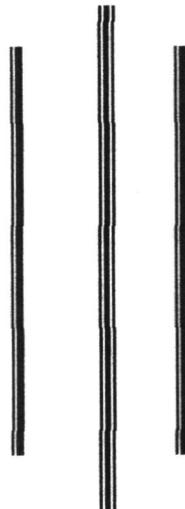
**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2014 NOMOR 2**

---

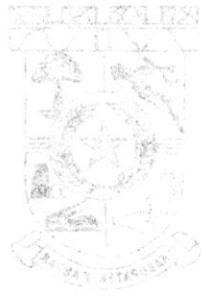
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 2 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2014**



KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2014 NOMOR 2  
LEMBARAN DAERAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA



BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2014



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, transparansi dan keterpaduan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan Pemerintah Daerah, perlu adanya Unit Layanan Pengadaan yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 dan 130 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mewajibkan setiap Kementerian/ Lembaga/ Daerah/ Institusi lainnya membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) paling lambat Tahun 2014;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Pembentukan Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25);
  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);



4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 );
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Nomor 155 );

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  
Penghapusan Negara di antara Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 2, Tambahan  
Lampiran Nomor 4175.

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang  
Pemeriksaan Pengadilan dan Pengadilan  
Kedua Negara (di antara Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan  
Lampiran Nomor 4176).

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang  
Pemeriksaan Organisasi dalam Negara Republik  
Indonesia Tahun 2004 Nomor 12, Tambahan  
Lampiran Nomor Republik Indonesia Nomor 4177,  
yang telah diubah dengan Undang-Undang  
Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang  
Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan  
Organisasi dalam Negara Republik Indonesia Tahun 2008  
Nomor 12, Tambahan Lampiran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4444.

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lampiran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,  
Tambahan Lampiran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4437).

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang  
Pemeriksaan Organisasi Pemerintahan  
Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 11, Tambahan Lampiran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4535).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang  
pedoman dalam Pelaksanaan dan Sistem Pemerintahan  
Pengawasan Daerah Internal dan Pemerintahan Daerah  
Kecamatan Kota Kabupaten Negara Republik  
Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan  
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 4371).

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang  
Pegawai Badan Usaha Pemerintah sebagaimana  
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54  
Tahun 2010 tentang Pegawai Badan Usaha  
Pemerintah (Lampiran Negara Nomor 155).

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Nomor 310 );

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kampar sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

*Dengan Persetujuan Bersama*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
dan  
BUPATI KAMPAR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR  
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar;
2. Bupati adalah Bupati Kampar;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar;
4. Kantor adalah Kantor Layanan Pengadaan Barang/jasa Kabupaten Kampar;
5. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Layanan Pengadaan Barang/jasa;
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah;



7. Pengadaan barang/jasa Pemerintah selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa;
8. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat di perdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang;
9. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya;
10. Jasa konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*);
11. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan Pengadaan Barang;
12. Kelompok Kerja ULP selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 2

- (1) Kantor adalah unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 3

- (1) Kepala Kantor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor mempunyai fungsi :



- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa;
  - b. Pengkoordinasian penyusunan rencana umum pengadaan barang / jasa;
  - c. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa;
  - d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan dan pembinaan pengadaan barang/jasa; dan
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Kantor mempunyai tugas membantu Bupati dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai lingkup tugasnya

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Pertama Susunan Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Kantor Layanan Pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas :
  - a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengadaan Barang;
  - d. Seksi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi;
  - e. Seksi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- (3) Bagan struktur organisasi Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB IV KELOMPOK KERJA Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan barang/jasa pada Seksi Pengadaan Barang, Seksi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Seksi Pengadaan Jasa Konsultansi dan Jasa Lainnya dibentuk Kelompok Kerja;
- (2) Pembentukan dan Tugas Kelompok Kerja ditetapkan oleh Kepala Kantor berdasarkan peraturan perundang-undangan



BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok sesuai bidang keahlian;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor;
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
TATA HUBUNGAN KERJA  
Pasal 7

Kantor mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 8

- (1) Kepala Kantor adalah pejabat eselon IIIa, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah pejabat eselon IVa;
- (2) Pejabat Eselon III dan eselon IV a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Setiap unsur organisasi di lingkungan Kantor wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 9

Pembiayaan Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL  
Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok sesuai bidang keahlian;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang yang diunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor;
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
TATA HUBUNGAN KERJA  
Pasal 7

Kantor mempunyai hubungan koordinatif struktural dengan Sekretariat Daerah dan hubungan koordinatif fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah lainnya.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 8

- (1) Kepala Kantor adalah pejabat eselon III, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah pejabat eselon IVa;
- (2) Pejabat Eselon III dan eselon IV a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Setiap unsur organisasi di lingkungan Kantor wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 9

Pembinaan Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN  
PENUTUP  
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
Pada tanggal 9 Januari 2014

BUPATI KAMPAR,

ttd

JEFRY NOER

Diundangkan di Bangkinang  
Pada tanggal 9 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,

ttd

ZULFAN HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2014 NOMOR 2

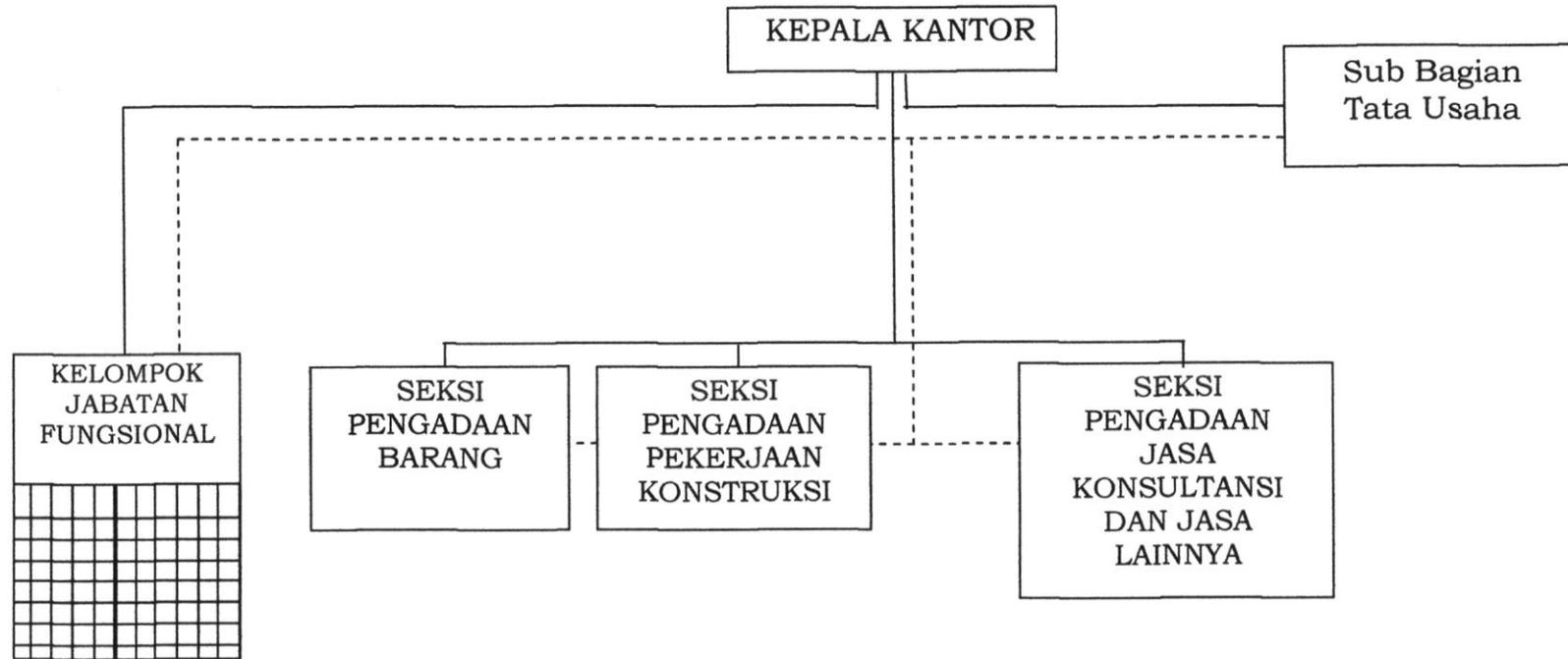
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

TARMIZI, SH. MH  
Pembina Tk.I (IV/b)  
NIP. 196801281994011001



BAGAN STRUKTUR KANTOR  
LAYANAN PENGADAAN  
BARANG/JASA



Keterangan :

- : Garis Instruktif  
----- : Garis Koordinatif

BUPATI KAMPAR,

ttd

JEFRY NOER

